



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 110 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja PD Tahun 2019 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2019.

(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Bab V : Penutup.

Padal 3

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

- a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
- e. Perubahan Renja Badan Daerah;
- f. Perubahan Renja Dinas Daerah;
- g. Perubahan Renja Kantor Daerah; dan
- h. Perubahan Renja Kecamatan.

(2) Perubahan Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Perubahan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(3) Perubahan Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. Terdiri atas:

- a. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
- c. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- e. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- i. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- k. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
 - m. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Perubahan Renja Dinas Perdagangan;
 - o. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan;
 - r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.
- (4) Perubahan Renja Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Perubahan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Perubahan Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. Perubahan Renja Kecamatan Srandakan;
 - b. Perubahan Renja Kecamatan Sanden;
 - c. Perubahan Renja Kecamatan Pajangan;
 - d. Perubahan Renja Kecamatan Sedayu;
 - e. Perubahan Renja Kecamatan Pandak;
 - f. Perubahan Renja Kecamatan Kasihan;
 - g. Perubahan Renja Kecamatan Bantul;
 - h. Perubahan Renja Kecamatan Bambanglipuro;
 - i. Perubahan Renja Kecamatan Kretek;
 - j. Perubahan Renja Kecamatan Pundong;
 - k. Perubahan Renja Kecamatan Sewon;
 - l. Perubahan Renja Kecamatan Jetis;
 - m. Perubahan Renja Kecamatan Imogiri;
 - n. Perubahan Renja Kecamatan Dlingo;
 - o. Perubahan Renja Kecamatan Pleret;
 - p. Perubahan Renja Kecamatan Banguntapan; dan
 - q. Perubahan Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal **26 OKTOBER 2018**

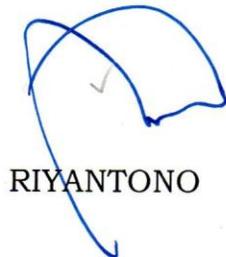
BUPATI BANTUL



SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal **26 OKTOBER 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR **110**

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 110 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2019

**DINAS PERTANAHAN DAN TATA
RUANG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 termasuk didalamnya Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019. Namun dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, perlu dilakukan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 termasuk Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 tersebut.

Selain itu, Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019 merupakan:

- a. Pedoman bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019.
- b. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
- f. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019; dan
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1.4. Sistematika Penulisan Sistemtika

Penyajian Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk perencanaan pembangunan Tahun 2019, perangkat daerah memerlukan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 dan perkiraan pencapaian hasil Tahun 2018. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada Tahun 2017 terdapat 5 Program dan 17 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,941%. Semua program capaian yang diraih 100 % pada Program Penataan, Pengawasan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan capaian terendah Tahun 2017 yaitu 99,98%. Perkiraan capaian Tahun 2018 diharapkan lebih baik dibanding dengan tahun 2017 dengan 8 program dan 24 kegiatan.

Adapun pelaksanaan kegiatan dan hasil pencapaian Tahun 2017 diurutkan sesuai program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan : Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 183.772.000,00
Realisasi Anggaran : Rp. 169.082.368,00 (92,007 %)
Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan dengan pembayaran honorarium pengelola keuangan dan kepegawaian 12 bulan, pembelian ATK , alat listrik dan elektronik, Meterai 795 lembar, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, pembayaran langganan telepon 12 bulan, air 11 bulan, listrik 12 bulan, surat kabar 2 eksemplar 12 bulan, belanja jasa kir 1 unit kendaraan, belanja cetak, penggandaan dan pembayaran makan minum rapat.21 kali rapat

- 2) Kegiatan : Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan konsultasi
Alokasi Anggaran : Rp. 109.582.700,00
Realisasi Anggaran: Rp. 87.919.797,00 (80,231 %)
Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan konsultasi dengan terbayarnya biaya perjalanan sebanyak 9 kali perjalanan dinas dalam daerah, 12 kali perjalanan dinas luar daerah dan rapat koordinasi sebanyak 64 kali rapat.
- 3) Kegiatan : Penyediaan Jasa Pengelola Perkantoran
Alokasi Anggaran : Rp. 142.900.000
Realisasi Anggaran: Rp. 140.785.000 (98,52 %)
Tingkat Capaian :Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Perkantoran dengan terbayarnya honor tenaga kontrak sebanyak 12 bulan sebanyak 6 personil

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 125.000.000,00
Realisasi Anggaran : Rp. 123.082.500,00 (98,466 %)
Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor dengan terwujudnya rehab 1 unit gedung logistik
- 2) Kegiatan :Pengadaan/Rehabilitasi kendaraan dinas / operasional
Alokasi Anggaran : Rp. 93.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 85.901.000 (92,367)
Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan Pengadaan/Rehabilitasi kendaraan dinas /operasional dengan terlaksananya pembelian 6 unit kendaraan roda 2.
- 3) Kegiatan: Pengadaan peralatan dan perlengkapan
Alokasi Anggaran : Rp. 10.000.000
Realisasi Anggaran: Rp. 8.590.100 (89,600)

Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan dengan terbayarnya pembelian 1(satu) buah kursi putar dan 2 unit IPAD

4) Kegiatan: Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 38.138.300

Realisasi Anggaran : Rp35.454.000 (92,962)

Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor dengan terbayarnya pemeliharaan gedung berupa pengecatan dan pemeliharaan lainnya.

5) Kegiatan: Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Alokasi Anggaran : Rp. 38.138.300

Realisasi Anggaran : Rp35.454.000 (97,834%)

Tingkat Capaian :Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dengan terpeliharanya pemeliharaan kendaraan dinas sejumlah 6 unit kendaraan roda 4 dan 13 unit kendaraan roda 2 dengan 56 kali servis/penggantian suku cadang dan pembelian BBM.

6) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Alokasi Anggaran : Rp31.767.200

Realisasi Anggaran : Rp26.176.000 (82,399%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan dengan terpeliharanya peralatan kantor dengan service peralatan kantor sejumlah 42 kali

c. Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini pada tahun 2017 hanya terdapat 1 (satu) yaitu Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang

1) Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang

Alokasi anggaran :Rp1.100.000.000

Realisasi anggaran : Rp1.025.579.497,00. (93,234%)

Tingkat capaian : pengadaan jasa konsultansi

- a) RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Bambanglipuro;
- b) RDTR dan Peraturan Zonasi serta Kecamatan Dlingo;
- c) KLHS Kecamatan Bambanglipuro
- d) KLHS Kecamatan Dlingo
- e) Penyusunan Raperda RDTR dan PZ Piyungan
- f) Penyusunan Raperda RDTR dan PZ Pansela
- g) Penyusunan Raperda RDTR dan PZ Jetis
- h) Penyusunan Raperda RDTR dan PZ Pundong
- i) Desain Citra Kota Bantul Jalan Jendral Sudirman

Hasil dari kegiatan ini bermanfaat sebagai instrumen *advice planning* operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

d. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Program ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp231.000.000,00 dengan 1 kegiatan.

- 1) Kegiatan Penyusunan Kebijakan pengendalian Pemanfaatan Ruang

Alokasi anggaran : Rp231.000.000,00

Realisasi anggaran : Rp204.123.985,00 (84,413)

Tingkat capaian :

- a) Kajian Platform Layanan Dinas
- b) Kajian Kematangan Masyarakat
- c) Aplikasi Broadcast
- d) Pengawasan yang tertangani sebanyak 545 bidang

e. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

- 1) Kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Alokasi anggaran : Rp580.995.000,00

Realisasi anggaran : Rp 470.130.850,00. (80,918)

Tingkat capaian : dilakukan 4 kali sosialisasi pemanfaatan tanah kas desa dan diterbitkan rekomendasi ke gubernur atas pemberian ijin tanah kas desa yang terdiri dari:

- a) Sertifikasi tanah kas desa sebanyak 54 bidang
- b) Rekomendasi Bupati ke Gubernur sebanyak 75 rekomendasi. dilakukan 4 kali sosialisasi pemanfaatan Tanah Kas Desa.

2) Kegiatan Pemberdayaan PPAT Kecamatan

Alokasi anggaran : Rp2.000.000,00

Realisasi anggaran : Rp2.000.000,00. (100%)

Tingkat capaian :Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas PPAT kecamatan dan transformasi peraturan perundangan di bidang pertanahan.

3) Kegiatan: Pensertifikatan dan Sewa Tanah Pemerintah Provinsi
DIY

Alokasi anggaran : Rp192.030.000,00

Realisasi anggaran : Rp82.122.075.00.(42,675%)

Tingkat capaian :

- a) Pensertifikatan Tanah

Berikut data status tanah di Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2017 adalah:

LUAS WILAYAH KERJA DAN KEPEMILIKAN HAT

No	Uraian	Jumlah		Prosentase (%)	
		Bidang	Luas (m ²)	Bidang	Luas (m ²)
A	Kabupaten Bantul	629.836	506.850.000	-	-
	Rata-rata		805 m ² / bid		
B	Tanah Terdaftar				
	1. HM	481.777	294.139.185	85,04	58,03
	2. HGB	19.126	7.282.095	3,38	1,44
	3. HP	3.245	8.727.115	0,57	1,72
	4. Wakaf	1.558	407.350	0,28	0,08
	5. Hak Lainnya (HPL, Sarusun)	11	2.433.413	0,002	0,48
	Jumlah	505.715	312.989.158	89,26	61,75
	Rata-rata per sertipikat		619 m ² / stpk		
C	Tanah belum terdaftar	124.121	193.840.842	19,71	38,25
	Rata-rata		1.561 m ² / bid		
D	Jumlah Penduduk		955.015 jiwa		

b) Pembayaran sewa tanah kas desa sebanyak 3 bidang, yaitu:

(1) **Pasar Piyungan**

Dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Bagian Tata Pemerintahan menyewa tanah milik Pemerintah DIY yang digunakan untuk Pasar Piyungan, Sekarang Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyewa sebesar Rp.33 jt, dan karena Dinas Perdagangan belum menganggarkan untuk sewa, maka sesuai dengan rapat koordinasi yang dilakukan, maka sewa tanah Pemerintah Daerah DIY untuk Pasar Piyungan dibebankan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, dan dari hasil rakor tersebut juga disepakati bahwa sewa tanah Pemerintah Daerah DIY kedepannya di anggarkan oleh Dinas Perdagangan.

(2) **PT DonYoung**

Dikarenakan Sewa tanah kas desa Sitimulyo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam hal ini Bagian Administrasi Pemerintahn Desa belum menganggarkan, maka pada Tahun 2017 dari hasil rapat koordinasi disepakati bahwa penganggaran oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebesar Rp.60.864.574,- Pada tahap selanjutnya bahwa perlu perbaikan perjanjian antara PT. Donyong dengan Pemerintah Desa, sehingga sewa tanah kas Desa Sitimulyo dibebankan pada PT Donyong dengan Pemerintah Desa.

(3) **SMA BAMBANGLIPURO**

Sewa tanah kas Desa oleh SMA Bambanglipuro disebabkan belum teranggarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, hal ini dikarenakan terjadi pengambilan urusan pendidikan di tingkat SLTA oleh Provinsi DIY, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul harus menanggung beban sewa SMA Bambanglipuro sebesar Rp. 1,3 jt. Untuk yang akan datang sewa tanah yang ada di kabupaten sudah menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY.

Tidak tercapainya realisasi keuangan dan fisik kegiatan tersebut disebabkan adanya perbedaan luasan

tanah saat perencanaan dengan luasan tanah saat pengukuran, sehingga target biaya ukur, jumlah patok menjadi lebih kecil.

- 4) Kegiatan: Pensertifikatan Tanah Warga (Proda)
 - Alokasi anggaran : Rp379.250.000,00
 - Realisasi anggaran : Rp233.279.560,00(61,511%)
 - Tingkat capaian : Terdaftarkannya tanah sebesar 400 bidang tanah warga di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul melalui program daerah dengan rincian sebagai berikut:
- 5) Kegiatan: Pemanfaatan Tanah *Sultan Ground* (SG)
 - Alokasi anggaran : Rp22.600.000,00
 - Realisasi anggaran : Rp221.917.500,00 (96,980%)
 - Tingkat capaian : Jumlah kekancingan yang dimohonkan ijin kekancingan 14 bidang tanah
- 6) Kegiatan: Penanganan Permasalahan Pertanahan
 - Alokasi anggaran : Rp18.950.000,00
 - Realisasi anggaran : Rp16.50.5000,00 (87,974%)
 - Tingkat capaian : Jumlah masalah yang tertangani sebanyak 5 kasus

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Jumlah Belanja Penggandaan, Sampah terangkut, Partisipasi Pameran dan Karnaval, Spanduk, Papan Nama, Komsumsi Rapat							
1	03	01	37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	rapat koordinasi dalam daerah, rapat koordinasi ke luar daerah, makan minum rapat, makan minum tamu	100	100	100	100	100	100	100
1	03	01	38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	jumlah honor non PNS, honorarium kontrak ahli, tenaga operator komputer, Pegawai kontrak/Repsesionis, Arsiparis	100	100	100	100	100	100	100
1	03	02		Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	85	70	70	100	75	70	88,235
1	03	02		Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Jml Belanja Rehailitasi gedung	100	100	100	100	0	0	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Honorarium tenaga harian lepas dan bahan-bahan bangunan gedung, halaman, pagar dan tempat parkir	100	100	100	100	100	100	100
1	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah belanja BBM, Suku cadang dan jasa servis, pajak kendaraan	100	100	100	100	100	100	100
1	03	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	100	100	100	100	100	100	100
1	03	02	51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan kursi putar dan printer	100	100	100	100	100	100	100
1	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan sumber daya aparatur	100	100	100	100	100	100	100
1	03	05	11	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Bmtek	100	100	100	100	100	100	100
1	03	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Nilai Evaluasi Kinerja	83	0	0	0	80	80	96,38
1	03	06	05	Penyusunan laporan keuangan, barang dan kepegawaian	Tersusunnya Laporan keuangan, asset dan kepegawaian	13	0	0	0	13	13	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	03	06	12	Pemutakhiran Data		1	0	0	0	1	1	100
1	03	32		Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang	4	3	2	66,67	3	3	75
1	03	32	01	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Ketersediaan dokumen rencana tata ruang	1	0	0	0	1	1	100
1	03	32	02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK,RTRK,dan RTBL	Raperda RDTR	4	0	0	0	1	1	25
1	03	32	03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Jumlah Sosialisasi	4	0	0	0	4	4	100
1	03	32	05	Penyusunan Rencana Detail TataRuang Kawasan	Dokumen rencana detail tata ruang kawasan	2	0	0	0	2	2	100
1	03	32	06	Penyusunan Rencana TeknisRuang Kawasan	Dokumen rencana detail teknis ruang kawasan	4	0	0	0	1	1	25
1	03	32	07	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Penyusunan Dokumen RTBL	7	0	0	0	6	6	85.71
1	03	32	38	Studi tentang TataRuang	Dokumen Kajian RTH	1	0	0	0	1	1	100
1	03	34		ProgramPengendalianPemanfaatanRuang	Prosentase pengendalian tata ruang	80	71	71	100	72	72	90

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	03	34	01	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Pengendalian yang ditangani	200	0	0	0	12	12	6
1	03	34	10	Pengembangan data pemanfaatan ruang	Sistem Aplikasi Pertanahan dan tata ruang	5	0	0	0	5	5	100
2	04	16		Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Cakupan sertifikasi tanah	100	84	84	100	88	88	88
2	04	16		Pemberdayaan PPAT kecamatan	Jumlah Pemberdayaan PPAT kecamatan	0	4	4	100	0	0	0
2	04	16	09	Inventarisasi tanah kas desa	Jumlah desa yang terinventarisir	75	75	75	100	75	75	100
2	04	16	14	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Bidang tanah sewa yang dibiayai pemda	50	8	8	100	75	75	100
2	04	16	16	Persetifikatan tanah warga (PRODA)	Jumlah sertifikat tanah warga	100	400	400	100	100	100	100
2	04	16	.17	Pemanfaatan Tanah SG	Jumlah rekomendasi	25	14	14	100	30	30	120
2	04	17		Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Angka penanganan konflik pertanahan	20	10	10	100	10	10	50
2	04	17	01	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Koordinasi dan peninjauan lokasi	20	5	5	100	5	5	50

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2016-2021. Analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sesuai Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

No	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja		Target Kinerja				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Perubahan Renstra Tahun 2016-2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	Dokumen	2	2	3	3	4	4	16
2	Persentase cakupan pengendalian tata ruang	%	0	71	72	75	77	80	80
3	Cakupan Sertifikasi Tanah	%	80	84	88	92	96	100	100

Berdasarkan Tabel 2.2, dapat dijelaskan bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1) Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan

Pada Tahun 2016, jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan ada 2 perda yaitu Perda RDTR Sewon dan Perda RTRW, sedang pada Tahun 2017 target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen tata ruang yang sudah diperdakan dan terealisasi sebanyak 2 dokumen. Capaian kinerja tersebut didukung oleh Program Perencanaan Tata Ruang dengan Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang.

2) Persentase cakupan pengendalian tata ruang

Persentase cakupan pengendalian tata ruang dihitung dengan formula jumlah luasan wilayah yang dikendalikan pemanfaatannya sesuai tata ruang di bagi jumlah luasan wilayah x

100%. Pada Tahun 2016, persentase cakupan pengendalian tata ruang belum diukur. Pada Tahun 2017, target yang ditetapkan sebesar 71% dan terealisasi sebesar 71% dengan rincian bahwa total luas wilayah di Kabupaten Bantul seluas 50.024,40 ha dengan luas wilayah sesuai dengan pemanfaatan ruang sebesar 35.602,66 ha.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Strategi yang ditempuh sebagai upaya dalam pengendalian pemanfaatan ruang adalah dengan melakukan banyak kerjasama dengan pihak terkait serta sosialisasi ke masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang penataan dan pemanfaatan tata ruang.

3) Cakupan Sertifikasi Tanah

Capaian target kinerja untuk cakupan sertifikasi tanah pada Tahun 2016 adalah 80% dan Tahun 2017 sebesar 84%. Realisasi tersebut diperoleh dari Jumlah bidang tanah yang bersertifikat dibagi jumlah seluruh bidang tanah dikalikan 100%. Untuk saat ini tanah yang belum bersertifikat sebanyak 157.130 bidang tanah. Melalui program PTSL/PRODA/PRONA diharapkan setiap tahun dapat dilaksanakan pensertifikatan tanah sebanyak 2.500 bidang tanah. Target capaian Tahun 2021 (akhir periode Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 84% dari target akhir Renstra Tahun 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya pensertifikatan tanah. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini dari Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah. Program tersebut di dukung dengan kegiatan antara lain :

- Pemberdayaan PPAT Kecamatan
- Pensertifikatan dan sewa tanah Pemda DIY
- Pensertifikatan tanah warga (PRODA)
- Pemanfaatan Tanah SG
- Penanganan permasalahan pertanahan

Untuk kegiatan pensertifikatan tanah warga melalui PRODA Kabupaten Bantul Tahun anggaran 2017 ada 400 bidang antara

lain di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri, Desa Poncosari Kecamatan Srandakan, Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak dan Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan. Dari 400 bidang target kegiatan, berkas pendaftaran sudah selesai semua dan sudah masuk ke Kantor Pertanahan dan sudah didaftarkan guna mendapatkan sertifikat.

Strategi yang akan ditempuh untuk pencapaian indikator kinerja cakupan sertifikasi tanah pada tahun berikutnya dengan memberikan motivasi dan jemput bola dilapangan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menyusun program kerja dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Dengan demikian isu-isu penting yang akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada Tahun 2019 adalah:

- Pencapaian dokumen tata ruang yang diperdakan sejumlah 3 dokumen,
- Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait serta sosialisasi ke masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang penataan dan pemanfaatan tata ruang,
- Jumlah bidang tanah yang bersertifikat mencapai 92% sesuai target yang telah ditetapkan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd

Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2019 dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2019 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kab. Bantul			3,121,715,000	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kab. Bantul			4,955,000,000	
32	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Kab. Bantul			1,362,600,000	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Kab. Bantul			2,955,000,000	
001	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Kab. Bantul	Raperda RTRW	1 dokumen	168,800,000	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Kab. Bantul	Raperda RTRW	1 dokumen	100,000,000	
002	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Kab. Bantul	tersedianya dokumen Raperda RDTR	1 dokumen	149,750,000	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Kab. Bantul	tersedianya dokumen Raperda RDTR	1 dokumen	300,000,000	
003	Sosialisasi peraturan perundang- undangan tentang rencana tata ruang	Kab. Bantul	Sosialisasi perarturan perundang undangan tentang rencana tata ruang tingkat desa	4 kali	60,300,000	Sosialisasi peraturan perundang- undangan tentang rencana tata ruang	Kab. Bantul	Sosialisasi perarturan perundang undangan tentang rencana tata ruang tingkat desa	4 kali	80,000,000	
006	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Kab. Bantul	Dokumen rencana ruang teknis kawasan strategis kabupaten	2 dokumen	154,250,000	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Kab. Bantul	Dokumen rencana ruang teknis kawasan strategis kabupaten	2 dokumen	300,000,000	
007	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Kab. Bantul	Dokumen RTBL dan Masterplan (Rencana Induk)	9 dokumen	775,325,000	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Kab. Bantul	Dokumen RTBL dan Masterplan (Rencana Induk)	9 dokumen	2,100,000,000	
038	Studi tentang Tata Ruang	Kab. Bantul	Dokumen Kajian RTH	1 dokumen	54,175,000	Studi tentang Tata Ruang	Kab. Bantul	Dokumen Kajian RTH	1 dokumen	75,000,000	
34	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Kab. Bantul			1,759,115,000	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Kab. Bantul			2,000,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
001	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Dokumen pengendalian pemanfaatan	1 dokumen	839,360,000	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Dokumen pengendalian pemanfaatan	1 dokumen	1,000,000,000	
010	Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Data dan informasi	1 dokumen	461,950,000	Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Data dan informasi	1 dokumen	500,000,000	
011	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Kab. Bantul	Peta Citra Tegak, Digitalisasi audit pemanfaatan ruang tahun 2018, Pendataan Aset PSU	2 aplikasi	457,805,000	PERTANAHAN	Kab. Bantul	Peta Citra Tegak, Digitalisasi audit pemanfaatan ruang tahun 2018, Pendataan Aset PSU	2 aplikasi	500,000,000	
0204	PERTANAHAN	Kab. Bantul			3,092,327,343		Kab. Bantul			3,192,260,000	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kab. Bantul		92%	1,533,682,343	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kab. Bantul		92%	1,380,000,000	
036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pelayanan	15 jenis	473,034,343	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pelayanan	15 jenis	480,000,000	
037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah Koordinasi	400 kali	739,648,000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah Koordinasi	400 kali	600,000,000	
038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Upah Tenaga Harian Lepas	140ob	321,000,000	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Upah Tenaga Harian Lepas	140ob	300,000,000	
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kab. Bantul		100%	1,144,680,000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kab. Bantul		100%	1,203,205,000	
022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Bantul	Terpeliharanya gedung kantor, pagar, halaman dan tempat parkir	4 jenis	324,150,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Bantul	Terpeliharanya gedung kantor, pagar, halaman dan tempat parkir	4 jenis	250,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Bantul	Jumlah belanja BBM, suku cadang dan jasa servis, dan pajak kendaraan	17 kendaraan	169,680,000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Bantul	Jumlah belanja BBM, suku cadang dan jasa servis, dan pajak kendaraan	17 kendaraan	162,415,000	
030	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	13 jenis	45,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	13 jenis	55,000,000	
051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Pengadaan komputer, printer, kursi rapat, almari es, drone, cors, kamera dan sound sistem	20 jenis	605,850,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Pengadaan komputer, printer, kursi rapat, almari es, drone, cors, kamera dan sound sistem	20 jenis	735,790,000	Perubahan volume
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kab. Bantul		92%	138,625,000	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kab. Bantul		92%	209,500,000	
008	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Kab. Bantul	kinerja laporan keuangan, barang, dan kepegawaian	12 bulan	124,425,000	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Kab. Bantul	kinerja laporan keuangan, barang, dan kepegawaian		159,500,000	
012	Pemutakhiran Data	Kab. Bantul	Arsip tersimpan dalam bentuk digital	11 seksi	14,200,000	Pemutakhiran Data	Kab. Bantul	Arsip tersimpan dalam bentuk digital		50,000,000	
16	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Kab. Bantul			238,390,000	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Kab. Bantul			343,305,000	
009	Inventarisasi tanah kas desa	Kab. Bantul	Data tanah kas desa		36,350,000	Inventarisasi tanah kas desa	Kab. Bantul	Data tanah kas desa		52,600,000	
014	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Kab. Bantul	dokumen pendataan tanah pemerintah, sertifikat dan		129,890,000	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Kab. Bantul	dokumen pendataan tanah pemerintah, sertifikat dan		172,100,000	

No	Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			sewa tanah					sewa tanah			
017	Pemanfaatan Tanah SG	Kab. Bantul	Permohonan surat kekancingan dan Rekomendasi Ijin Gubernur		72,150,000	Pemanfaatan Tanah SG	Kab. Bantul	Permohonan surat kekancingan dan Rekomendasi Ijin Gubernur		118,605,000	
17	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK- KONFLIK PERTANAHAN	Kab. Bantul		100%	36,950,000	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK- KONFLIK PERTANAHAN	Kab. Bantul			56,250,000	
001	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kab. Bantul	Koordinasi dan peninjauan lokasi	5 masalah	36,950,000	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kab. Bantul	Koordinasi dan peninjauan lokasi		56,250,000	
	jumlah									8,147,260,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan-usulan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembuatan DED Kecamatan Jetis	Kecamatan Jetis	Dokumen	1 (Satu)	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung prioritas nasional bidang Penataan Ruang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang maka sasaran-sasaran yang perlu dicapai yakni tersusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis provinsi dan kabupaten/kota, terselenggaranya konsultasi dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis provinsi dan kabupaten.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2016-2021. Dengan demikian, tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan pengelolaan Ruang	Meningkatnya pensertifikatan tanah
Meningkatkan efektifitas Penataan dan Pengelolaan Ruang Yang Partisipatif, serasi dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan Ruang
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang

Guna tercapainya tujuan dan sasaran maka diperlukan kebijakan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/pegangan/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan

sasaran. Kebijakan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bantul dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pelayanan Dinas,
- b. Peningkatan Capaian Kinerja Dinas,
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perencanaan ruang ,
- d. Peningkatan tertib pemanfaatan ruang,
- e. Peningkatan pengendalian dan pengawasan ruang sesuai dengan rencana tata ruang,
- f. Meningkatkan keakuratan data base pertanahan,
- g. Menyelesaikan target 100% pensertifikatan tanah dengan mendukung program pemerintah PTSL yang dilakukan BPN.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2019, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjalankan 2 (dua) Urusan Pemerintahan dengan 7 (tujuh) Program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Rencana program dan kegiatan Tahun 2019 secara rinci disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020401	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG				5,575,532,343.00	5,825,201,248.85		
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				2,855,655,000.00	2,983,529,472.87		
0103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2,855,655,000.00	2,983,529,472.87		
0103.32	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG		Dokumen Tata Ruang Yang Sudah Diperdakan	2 dokumen	1,274,100,000.00	1,331,153,413.63		
0103.020401.32.001	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Kab.Bantul	Jumlah Penyusunan Naskah akademik Raperda tentang RTRW	1 dokumen	168,800,000.00	176,358,760.08		P1
0103.020401.32.002	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Kab.Bantul	Jumlah Penyusunan Naskah akademik Raperda tentang RDTR	2 dokumen	149,750,000.00	156,455,712.81		P1
0103.020401.32.003	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Kab.Bantul	Jumlah desa tersosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang	4 desa	46,800,000.00	48,895,675.19		P1
0103.020401.32.006	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Kab.Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Ruang	2 dokumen	154,250,000.00	161,157,220.04		P1
0103.020401.32.007	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Kab.Bantul	Jumlah dokumen RTBL tersusun	5 dokumen	700,325,000.00	731,685,122.36		P1
0103.020401.32.038	Studi tentang Tata Ruang	Kab.Bantul	Jumlah Dokumen Studi tentang tata ruang	1 dokumen	54,175,000.00	56,600,923.15		P1
0103.34	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang	75 persen	1,581,555,000.00	1,652,376,059.25		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0103.020401.34.001	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kab.Bantul	Jumlah bidang Konsolidasi Tanah	110 Bidang	750,000,000.00	783,584,538.28		P1
			Jumlah Pengendalian dan Monitoring di kecamatan	6 Kecamatan				
			Jumlah Audit Pemanfaatan Tanah tahun 2018 di kecamatan	9 kecamatan				
0103.020401.34.010	Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab.Bantul	Jumlah peta desa	3 Peta Desa	392,950,000.00	410,546,059.09		P1
			Survey dan Penentuan Lokasi Absolute Tanah Kas Desa dan Tanah Sultan Ground	38 kali				
0103.020401.34.011	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Kab.Bantul	Jumlah dokumen Digitalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 dok pengend. ruang	438,605,000.00	458,245,461.88		P1
			Jumlah dokumen Digitalisasi Audit Pemanfaatan ruang	1 dok Audit pemanfaatan				
			Jumlah dokumen Pendataan Aset Penyerahan Sarana	6 dok pendataan aset				
			Jumlah Utilitas (PSU) Perumahan di kecamatan	6 kecamatan				
			Jumlah dokumen Penyusunan Konsep dan perancangan Fasad sebagai citra Kota Jl. Jend. Sudirman	1 dok perenc dan Fasad				
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				2,719,877,343.00	2,841,671,775.98		
0204	PERTANAHAN				2,719,877,343.00	2,841,671,775.98		
0204.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian Nilai AKIP	82 angka	1,403,782,343.00	1,466,642,852.11		
0204.020401.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab.Bantul	Jumlah ATK Kegiatan	20 Jns	417,034,343.00	435,708,884.14		P1
			Jumlah alat listrik dan elektronika	11 jenis				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah meterai	1600 lembar				
			Jumlah peralatan kebersihan	14 Jenis				
			Jumlah pengisian tabung	15 kali				
			Jumlah pembelian bendera	2 buah				
			Jumlah pembayaran telepon	12 kali				
			Jumlah pembayaran air	12 kali				
			Jumlah pembayaran listrik	60 kali				
			Jumlah pembayaran surat kabar	12 kali				
			Jumlah pembayaran internet	14 kali				
			terlaksananya publikasi	14 bh				
0204.020401.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Perjalanan Dinas dalam daerah	1168 kali	665,748,000.00	695,559,785.59		P1
			Perjalanan Dinas Luar daerah	240 kali				
			Jumlah jamuan rapat	3300 Dos				
			Jumlah Jamuan TAmu	250 dos				
0204.020401.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Jumlah honor Tenaga kontrak	140 orang bulan	321,000,000.00	335,374,182.38		P1
0204.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	80 Persen	984,430,000.00	1,028,512,169.36		
0204.020401.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Penggantian jaringan listrik	3 Unit	231,250,000.00	241,605,232.64		P1
			Pemeliharaan Halaman dan tanaman	1 unit				
			Jumlah pemeliharaan Pagar	1 unit				
			Jumlah pemeliharaan Gedung	4 unit				
			Terpeliharanya Tempat Parkir	1 unit				
0204.020401.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah BBM	9000 liter	169,680,000.00	177,278,165.94		P1
			Jumlah Penggantian Suku Cadang & Service	17 unit				
			Jumlah kendaraan dengan Pajak Kendaraan	17 unit				
0204.020401.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis pemeliharaan peralatan kantor	5 Jenis	40,000,000.00	41,791,175.37		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0204.020401.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Almari Arsip Peta	2 Unit	543,500,000.00	567,837,595.41		P1
			Jumlah Rak Buku	4 Unit				
			Jumlah Sound System	1 Unit				
			Jumlah Kulkas	2 Unit				
			Jumlah AC	1 Unit				
			Jumlah Komputer Server	3 Unit				
			Jumlah Laptop	4 unit				
			Jumlah Ipad	1 unit				
			Jumlah Komputer	3 Unit				
			Jumlah Printer	4 unit				
			Jumlah Printer A3	2 unit				
			Jumlah Monitor Led42	1 unit				
			Jumlah Meja Rapat	30 unit				
			Jumlah Kursi Rapat	55 unit				
			Jumlah GPS	1 unit				
			Jumlah Kamera	1 unit				
Jumlah Drone	1 unit							
Jumlah Software	1 aplikasi							
0204.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Cakupan Nilai Evaluasi Kinerja	81 Angka	128,625,000.00	134,384,748.31		
0204.020401.06.008	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan		Honor Pengelola Keuangan & Brg	156 ob	114,425,000.00	119,548,881.06		P1
			Jasa Konsultansi	1 dokumen				
0204.020401.06.012	Pemutakhiran Data		Jumlah arsip digital	21 jenis	14,200,000.00	14,835,867.26		P1
0204.16	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH		Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	92 dokumen	169,815,000.00	177,419,211.16		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0204.020401.16.009	Inventarisasi tanah kas desa		Jumlah data base terupdate	75 desa	32,775,000.00	34,242,644.32		P1
			Jumlah peserta sosialisasi	200 orang				
0204.020401.16.014	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY		Jumlah pendaftaran berkas dan pembayaran ke Kantor Pertanahan	64 bidang	64,890,000.00	67,795,734.25		P1
			Jumlah peserta Sosialisasi	200 orang				
0204.020401.16.017	Pemanfaatan Tanah SG		Jumlah Permohonan surat kekancingan/Rekomendasi Bupati	20 dokumen	72,150,000.00	75,380,832.58		P1
0204.17	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN		Jumlah Penanganan konflik pertanahan	15 kasus	33,225,000.00	34,712,795.05		
0204.020401.17.001	penyelesaian konflik-konflik pertanahan		Jumlah permasalahan pertanahan yang ditangani / difasilitasi	10 buah	33,225,000.00	34,712,795.05		P1
			Jumlah peserta sosialisasi konflik pertanahan	200 orang				

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah periode Tahun 2019 yang disusun dalam rangka menyesuaikan program/kegiatan dan target kinerja yang diatur di dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Selain itu, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 ini akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2019. Selain itu Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2019. Evaluasi terhadap hasil Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.


BUPATI BANTUL,
SUHARSONO